



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG RAHARJO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS BADAN**
3. NHK : **72459**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 194.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR/NC12AF2CBI A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, HONDA A1F02N36M1AT / SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 53.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.735.484.947**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 6.832.484.947



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

6.832.484.947

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.